KOTA
PASURUAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

OLEH :

KECAMATAN BUGUL KIDUL

Jl.Ir. H. Juanda Nomor 62 Pasuruan Jawa Timur 67121

TAHUN :

2025-2029





Telp. (0343) 421480
www.bugulkidul.pasuruankota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025–2029** dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi arah pembangunan di Kecamatan Kecamatan Bugul Kidul selama lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh jajaran aparatur kecamatan dalam merumuskan kebijakan, menyusun program, dan melaksanakan kegiatan yang selaras dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan Kota Pasuruan.

Dalam penyusunannya, Renstra ini telah melalui proses yang sistematis dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta potensi dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Bugul Kidul. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan sekaligus menjadi landasan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pemberdayaan masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan, kerjasama, serta masukan berbagai pihak, baik dari perangkat daerah, lembaga kemasyarakatan, maupun masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kecamatan Bugul Kidul, sehingga tujuan bersama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing dapat tercapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 10
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bugul Kidul 10
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Bugul Kidul 12
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan 14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bugul Kidul 19
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Bugul Kidul 20
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Kecamatan Bugul Kidul 21
2.1.6 Kerjasama Daerah Kecamatan Bugul Kidul 22
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 22
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bugul Kidul 22
2.2.2 Isu Strategis 23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN 26
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025-2029 26
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025-2029 27
3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025-2029 31
3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025-2029 33
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 35
4.1 Uraian Program 35
4.2 Uraian Kegiatan 37

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan pagu Indikatif 58
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah 82
4.5 Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 82
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). 83
BAB V PENUTUP 84
LAMPIRAN 85
Lampiran 1 Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Bugul Kidul sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Pasuruan, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pasuruan. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Bugul Kidul dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Bugul Kidul untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Bugul Kidul selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Pasuruan.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Dokumen Renstra Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2025- 2029 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Bugul Kidul. Sejajar dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2025 - 2029 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kota Pasuruan. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 sebagai acuan dalam menyusun Renstra Kecamatan Bugul Kidul dan sekaligus

mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Perubahan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2025 -2029;

2. Renstra Tahun 2025-2029 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Jawa Timur dan RPJMD Kota Pasuruan;
3. Renstra Tahun 2025-2029 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bugul Kidul;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Instruksi Pesiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Instruksi Pesiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus utamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran

Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran H a l a m a n | 1-8 Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); dan
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah rencana pembangunan Kecamatan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat gambaran pelayanan organisasi Kecamatan, permasalahan strategis yang ada dalam konteks tugas dan fungsi organisasi Kecamatan, serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas dalam upaya turut mendukung RPJMD Kota Pasuruan tahun 2025-2029;

2. Menjabarkan Visi dan Misi walikota Pasuruan Tahun Tahun 2025-2029 ke dalam Tujuan, Sasaran dan Program Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Jangka Menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau Rencana Kinerja Tahunan;
4. Menentukan strategi untuk Pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertical dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BUGUL KIDUL

berisi Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah dan permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Renstra PD Kota Tahun 2025-2029, Sasarana Renstra PD Tahun 2025- 2029, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

berisi Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Bugul Kidul

Evaluasi kinerja Kecamatan Bugul Kidul dilakukan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra sebelumnya, secara umum, capaian kinerja menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target.

Capaian IKU Kecamatan Bugul Kidul periode 2021–2025 memperlihatkan tren yang cukup baik. Beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan, antara lain :

- Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi
- Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart
- Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif

Namun demikian, masih terdapat indikator yang pencapaiannya fluktuatif, khususnya terkait Usulan Musrenbangcam yang Disepakati dalam Forum PD.

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bugul Kidul berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bugul Kidul periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bugul Kidul dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Isu Strategis Kecamatan Bugul Kidul

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Bermutu				

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Bugul Kidul

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan Bugul Kidul merupakan bagian dari unsur Perangkat Daerah Kota Pasuruan, dimana Kecamatan Bugul Kidul masuk pada type B dan dalam sistem Pemerintahannya dipimpin oleh seorang Camat dengan Tingkat Eselon III-a mandiri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pasuruan.

Kecamatan Bugul Kidul terdiri atas 6 (enam) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Bakalan
2. Kelurahan Krampyangan
3. Kelurahan Blandongan
4. Kelurahan Kepel
5. Kelurahan Bugul Kidul
6. Kelurahan Tapa'an

Dengan jumlah Pegawai sebanyak 51 orang yang bertugas di Kecamatan Bugul Kidul dan tersebar di masing-masing Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan, membawahi 2 Kepala Sub Bagian yaitu:
   a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Kepala Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan
2. 4 Kepala Seksi dan 6 Lurah yaitu :
   a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
   b. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan;
   c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana;
   d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
   e. 6 Lurah, masing-masing Lurah membawahi:
      - Sekretaris Kelurahan;
      - Seksi Pemerintahan, Trantib dan Pelayanan Umum;
      - Seksi Pemberdayaan Masyarakatan dan Sarana Prasarana; dan

- Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.

Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bugul Kidul dihadapkan kepada permasalahan yang timbul dan merupakan faktor penghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok, sehingga permasalahan yang ada merupakan tantangan yang perlu dikaji dan disikapi agar tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks.

Sesuai Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

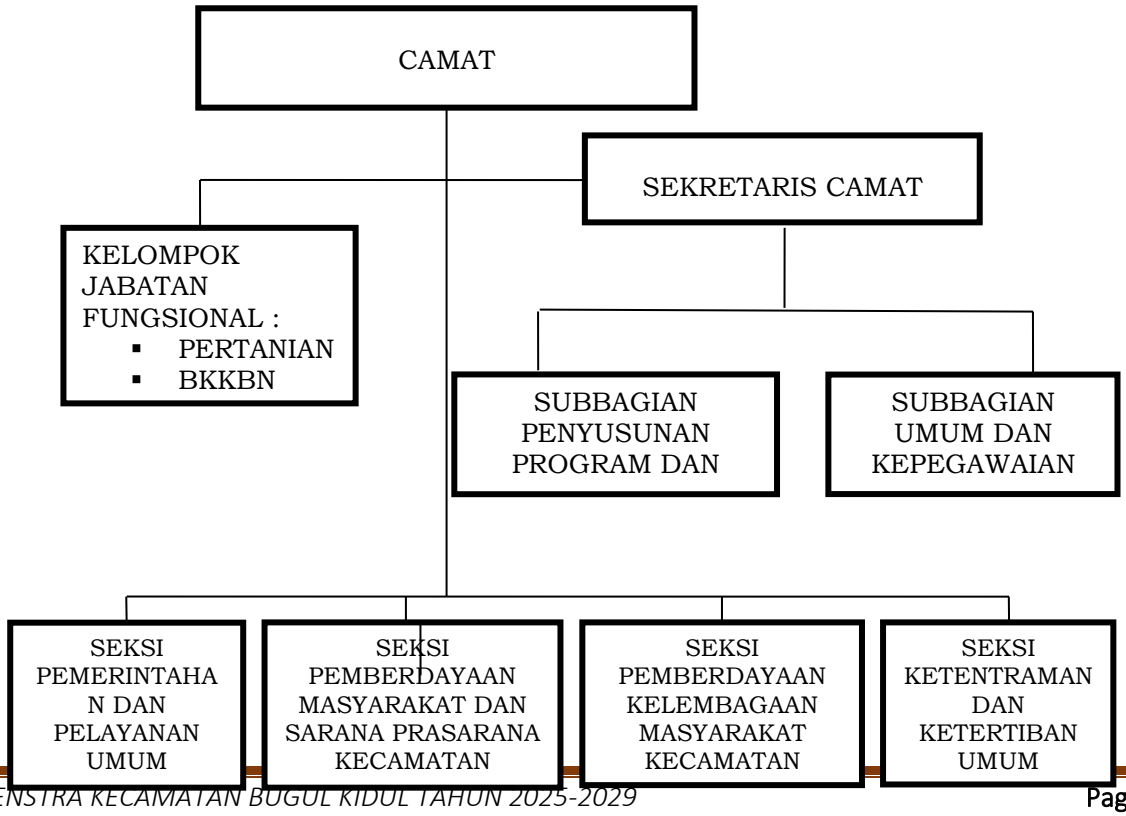
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi urusan pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
b. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum di wilayah Kecamatan;
c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Kecamatan; dan
d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Kecamatan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan. Camat mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota ;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
j. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Bugul Kidul

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Bugul Kidul

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan. Pemerintah Kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat. Sumberdaya Manusia yang tersedia di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sejumlah 51 orang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) dan Non ASN (TK dan PHL).

Tabel 2.2
Klasifikasi PNS Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Bugul Kidul berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	1	1	2
2	Golongan III	16	15	31
3	Golongan II	11	6	17
4	Golongan I	-	-	-
	JUMLAH	**28**	**22**	**50**

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bugul Kidul 2024

Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Bugul Kidul berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 3	-	-	-
2	Strata 2	2	1	3
3	Strata 1	10	8	18
4	Diploma 3	6	1	7
5	Diploma 1	-	-	-
6	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	16	5	21
7	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat	1	-	1
	JUMLAH	**35**	**15**	**50**

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bugul Kidul 2024

Klasifikasi PPPK Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Bugul Kidul berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	-	-	-
3	Diploma 3	-	-	-
4	Diploma 1	-	-	-
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	-	-	-
6	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat	-	-	-
	JUMLAH	**-**	**-**	**-**

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bugul Kidul 2025

Klasifikasi Pegawai Tenaga Kontrak Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Bugul Kidul berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	4	-	4
3	Diploma 3	-	-	-
4	Diploma 1	-	-	-
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	12	4	16
6	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat	-	-	-
7	Sekolah Dasar / Sederajat	-	-	-
	JUMLAH	**16**	**4**	**20**

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bugul Kidul 2024

Klasifikasi PHL Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Bugul Kidul berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	-	-	-
3	Diploma 3	-	-	-
4	Diploma 1	-	-	-
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	10	4	14
6	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat	4	2	6
	JUMLAH	**14**	**6**	**20**

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bugul Kidul 2025

Selain sumber daya manusia Kecamatan Bugul Kidul juga mempunyai sumber daya asset/modal yang memadai yang terdiri dari:

Tabel 2.3

Sarana dan Prasarana Kecamatan Bugul Kidul

No	Prasarana dan Sarana	Tahun Pembangunan/Pembuatan /Pembelian	Jumlah
1	Mobil	2012	1 unit
2	Brangkas	2012	1 unit
3	Komputer	2013	4 unit
4	Printer	2013	4 unit
5	Filling Kabinet	2013	4 unit
6	Filling Lemari	2013	1 unit
7	Meja Kerja Eselon III	2013	2 unit
8	Kursi Kerja Eselon III	2013	2 unit
9	Meja Kerja Eselon IV	2013	7 unit
10	Kursi Kerja Eselon IV	2013	7 unit
11	Meja Kerja Staf	2013	21 unit
12	Kursi Kerja Staf	2013	21 unit
13	Kursi Tamu	2013	1 set
14	Meja Rapat	2013	6 unit
15	Kursi Rapat	2013	25 unit
16	Lemari Arsip	2013	8 unit
17	Bangku Tunggu	2013	3 unit
18	Podium	2013	1 unit
19	Kursi Lipat	2013	200 unit
20	Kursi Tamu	2013	2 set
21	Mesin Ketik Elektronik	2013	1 unit
22	Layar LCD	2013	I unit
23	AC	2013	6 unit
24	Pengeras Suara	2013	1 unit
25	Genset	2013	I unit
26	Komputer	2013	4 unit
27	Meja Komputer	2013	4 unit
28	Papan Data	2013	2 unit
29	Jaringan air PDAM	2013	I unit
30	Instalasi Listrik	2013	I unit
31	Note Book	2013	1 unit
32	Printer	2013	4 unit
33	Dispenser	2013	3 unit
34	Kulkas	2013	1 unit
35	Televisi	2013	1 unit
36	Kamera Digital	2013	I unit
37	Proyektor LCD	2013	1 unit
38	Wireless	2013	1 unit
39	Rik	2013	15 unit

40	Komputer	2013	13 unit
41	Printer	2013	13 unit
42	UPS	2013	13 unit
43	Stabilizer	2013	13 unit
44	Meja Komputer	2013	13 unit
45	Meja Kerja	2014	5 unit
46	Meja Rapat	2014	5 unit
47	Kursi Rapat	2014	10 unit
48	Almari Rak Buku	2014	5 unit
49	Almari Arsip	2014	5 unit
50	Kursi Tunggu	2014	6 unit
51	Kursi Lipat	2014	20 unit
52	Kursi Tamu	2014	1 set
53	AC	2014	13 unit
54	Komputer	2014	2 unit
55	Note Book	2014	2 unit
56	Printer	2014	2 unit
57	Dispenser	2014	2 unit
58	Kulkas	2014	1 unit
59	Televisi	2014	1 unit
60	Kamera Digital	2014	1 unit
61	PHBX	2014	1 unit
62	Mesin fax	2014	1 unit
63	Handy Talky	2014	15 unit
64	Alat Makan	2015	1 set
65	Filling Kabinet 4 laci	2015	4 unit
66	Rak Buku Besar	2015	10 buah
67	Lemari Arsip	2015	3 buah
68	Kursi Lipat	2015	80 unit
69	Kompor Gas	2015	1 unit
70	Rak Piring Kaca Besar 2 Pintu	2015	1 unit
71	Pompa Jetpump, daya hisap 30 m	2015	1 unit
72	Tangga Portable 300600 cm – 10 step	2015	1 unit
73	Komputer/PC	2015	1 unit
74	Note Book	2015	14 unit
75	Printer	2015	2 unit
76	Switch Hub 24 Port	2015	1 unit
77	Megaphone	2015	1 unit
78	Card Reader	2015	1 unit
79	Mesin Hitung	2016	1 unit
80	Mesin penghancur kertas	2016	1 unit
81	Brankas	2016	13 unit
82	Komputer/PC	2016	14 unit
83	Komputer Note Book	2016	15 unit
84	Printer	2016	17 unit
85	Meja Kerja	2016	65 unit
86	Kursi Kerja	2016	16 unit
87	Kursi Rapat	2016	425 unit
88	Kursi Tunggu	2016	15 unit

89	Kompor Gas	2016	1 unit
90	Rak Piring	2016	1 unit
91	Komputer PC	2017	4 unit
92	Belanja Speaker Aktif	2017	1 unit
93	Belanja Modal Pengadaan Printer	2017	1 unit
94	AC	2017	4 unit
95	Dispenser	2017	3 unit
96	Meja Makan	2017	1 unit
97	Tempat Tidur + spring bed	2017	1 unit
98	Sofa	2017	1 unit
99	Lemari	2017	1 unit
100	Komputer PC Dell Core i3-7100	2018	18 unit
101	Korden Rail Alumunium	2018	160 m
102	Kursi Kerja Staf	2018	23 unit
103	Lemari Arsip Besi Brother	2018	16 unit
104	AC 2 PK sharp	2018	6 unit
105	AC 1 PK sharp	2018	2 unit
106	Printer Brother 1700	2018	15 unit
107	Hand Sprayer	2018	13 unit
108	Kamera Canon EOS 800D	2018	1 unit
109	LCD Proyektor EPSON E8	2018	3 unit
110	Tripot Screen Proyektor Epson	2018	3 unit
111	CCTV 16 channel DVR HIKH Vision	2018	1 paket
112	CCTV channel DVR HIKH Vision	2018	2 paket
113	AC Polytron 2 PK	2019	7 Unit
114	Meja Kerja Uk. 60 x 140 x75 cm	2019	5 Unit
115	Meja Berkas Uk. 45 x 155 x 75 cm	2019	4 Unit
116	Meja Kerja Uk. 60 x 120 x75 cm	2019	9 Unit
117	Meja Berkas Uk. 45 x 120 x 75 cm	2019	3 Unit
118	Meja Resepsionis Uk. 60 x 180 x 260 x 110 cm	2019	1 Unit
119	Meja Rapat	2019	1 Unit
120	Kursi Kerja Pimpinan	2019	5 Unit
121	Kursi Kerja Staff	2019	11 Unit
122	Sofa Tamu (1+1+3) Meja Tamu	2019	1 Set
123	Lemari Arsip 45 x 225 x 200 cm	2019	2 Unit
124	Lemari Arsip 45 x 120 x 80 cm	2019	1 Unit
125	Lemari Arsip 45 x 185 x 80 cm	2019	1 Unit
126	Lemari Arsip 45 x 210 x 80 cm	2019	1 Unit
127	Lemari Arsip 45 x 200 x 80 cm	2019	2 Unit
128	Lemari Arsip 45 x 240 x 80 cm	2019	2 Unit
129	Kursi Tunggu	2019	3 Unit
130	Kursi Hadap Lipat Matrix	2019	15 Unit
131	Tangga Aluminium 3 m	2019	2 Unit
132	Laptop HP Core i5	2019	1 Unit
133	Papan data monografi	2019	3 unit
134	Papan data struktur	2019	1 unit
135	Speaker pasif 12” + box	2019	2 unit
136	Braket speaker gantung	2019	1 unit
137	Wireless Microphone	2019	1 unit

138	Power mixer 350 watt	2019	I unit
139	LCD proyektor Epson EBW 41	2019	11 unit
140	Layar Tripot TR 121	2019	11 unit
141	Tempat Parkir	2019	1 paket
142	Kanopi Teras	2019	1 unit
143	Paving kel bugul lor	2019	1 paket
144	Tambah daya listrik	2019	10 paket
145	Thermometer Thermal Gun	2020	16 unit
146	Hand Sprayer	2020	27 unit
147	Drainase	2020	1 paket
148	Paving	2020	1 paket
149	Karpet	2020	17 unit
150	Korden	2020	10 unit
151	AC 2 PK	2020	14 unit
152	Laptop core I 7	2020	14 unit
153	Printer int tank multifungtion all in one L6170	2020	3 unit
154	Smart TV	2020	3 unit
155	Tabung Pemadam Kebakaran	2020	9 unit

Sumber : *Data Inventaris Barang per 31 Desember 2024*

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

Pengembangan kinerja pelayanan publik senantiasa menyangkut tiga unsur pokok pelayanan publik yaitu unsur kelembagaan penyelenggara pelayanan, proses pelayanannya serta sumber daya manusia pemberi layanan. Dalam hubungan ini maka upaya peningkatan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kebijakan otonomi daerah sekarang ini, telah terjadi perubahan mandasar menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, kalau pada era sebelumnya, Kecamatan merupakan wilayah administrasi

pemerintah, sedangkan dalam kebijakan otonomi daerah sekarang ini Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, Kecamatan yang sebelumnya merupakan “perangkat wilayah” dalam rangka asas dekosentrasi, berubah statusnya menjadi ”perangkat daerah” dalam rangka asas desentralisasi.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Kecamatan dipimpin Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati dan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain itu, Camat menyelenggarakan tugas–tugas umum pemerintahan yang antara lain adalah melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti kualitas pelayanan publik yang efektif yaitu kemampuan kecamatan untuk memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan masyarakat dan bisa diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

yaitu Nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

- Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi kinerja secara sistematis dan berkala untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pelayanan kecamatan.
- Penetapan Standar Pelayanan: Menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- Pengelolaan Pengaduan: Mengelola pengaduan masyarakat dengan baik untuk mengetahui masalah dan meningkatkan pelayanan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bugul Kidul

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bugul Kidul dihadapkan kepada permasalahan yang timbul dan merupakan faktor penghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok, sehingga permasalahan yang ada merupakan tantangan yang perlu dikaji dan disikapi agar tugas pokok dan fungsi kecamatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks. Permasalahan pelayanan kecamatan dapat meliputi beberapa aspek, seperti:

1. Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas, dapat menghambat kualitas pelayanan kecamatan.
2. Birokrasi yang rumit: Proses birokrasi yang rumit dan berbelit-belit dapat menyebabkan keterlambatan dan kesulitan dalam pelayanan.
3. Kurangnya transparansi: Kurangnya transparansi dalam pelayanan dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan kesulitan dalam mengakses informasi.
4. Keterlambatan pelayanan: Keterlambatan pelayanan dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat.
5. Kurangnya kualitas pelayanan: Kurangnya kualitas pelayanan dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat.
6. Masalah infrastruktur: Masalah infrastruktur dan fasilitas publik yang tidak memadai, dapat menghambat pelayanan.
7. Kurangnya partisipasi masyarakat: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan dapat menyebabkan pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.2.2 Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu

strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Memperhatikan Isu Strategis Kota Pasuruan dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Pasuruan, maka Isu Strategis Pembangunan Kecamatan Pasuruan dapat dilihat di tabel berikut ini:

1. Inovasi pelayanan publik

   Sebagai tuntutan reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan sebaliknya kewajiban bagi aparatur untuk memberikan pelayanan yang baik.
2. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat.

   Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dangan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Bugul Kidul yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh perangkat daerah.

Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pasuruan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.
Kecamatan Bugul Kidul menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan** dengan Sasaran **Meningkatnya** 26 **Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik**. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan Merata berbasis Digital” dengan

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 **Meningkatnya Pelayanan Publik**. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bugul Kidul, dalam hal ini Kecamatan

Bugul Kidul Kota Pasuruan diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Pasuruan dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Bugul Kidul menetapkan sasaran strategik ”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan”. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bugul Kidul tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Bugul Kidul yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

3.3. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara

apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kota Pasuruan, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Merata berbasis Digital	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,55	4,57	4,59	4,61	4,62	4,63	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	93,5	94	94,5	95	95,5	96	

3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Bugul Kidul sebagai berikut :

Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAPI IV (2029)	TAHAPI V (2030)
1	2	3	4	5
Digitalisasi dan Teknologi (digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam pelayanan publik)	Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Layanan Publik Terintegrasi dan Efektif	Penguatan Infrastruktur Penunjang	Mewujudkan Infrastruktur Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berkelanjutan

3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rentrsa PD

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum	Percepatan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Peningkatan terhadap laporan masyarakat	Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Menyusun Rencana Program , Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan rencana ini mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam ketentuan umum disebutkan bahwa:

1. Program adalah Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya berisi satu atau lebih kegiatan dengan mengggunakan sumber daya lyang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kegiatan perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
3. Sub Kegiatan adalah Rincian lebih lanjut dari kegiatan. Sub kegiatan memuat aktivitas spesifik yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan berkontribusi langsung pada pencapaian keluaran (output).

4. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ukuran keberhasilan

Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang diukur melalui capaian indikator kinerja untuk mendukung pencapaiannya.

Berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Bugul Kidul, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dirancang dan disusun secara terintegrasi, akuntabel dan berorientasi pada hasil, guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai
kinerja yang ada pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dimulai dari tahun 2025-2029 antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuanga Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   3. Penyediaan Bahan/ Material
   4. Penyediaan Kunjungan Tamu

5 .Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pelakasanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan

Renstra Kecamatan Bugul Kidul

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Meningkat	**100**	**100**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi (%)**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
			100	**100**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
			2	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			4	4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			4	4	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

			100	**100**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
			51	51	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			1	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			12	12	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			100	**100**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu (%)**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	
			2	2	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	
			100	**100**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
			1	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

			1	1	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			2	2	Jumlah Bahan / Material yang disediakan	Penyediaan Bahan / Material	
			4	4	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			12	12	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	
			100	**100**	**Presentase Terpenuhinya pengadaan bmd**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
			4	4	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
			4	4	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			100	**100**	**Persentase terpenuhinya jasa Penunjang layanan perkantoran**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan)**	
			2	2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			12	12	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			12	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

			100	**100**	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah**	
			8	8	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	
			39	39	Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	
			1	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			87	**87**	**Persentase Usulan Musrenbangcam Yang Diakomodir Dalam Musrenbangkot**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	
			54	**54**	**Jumlah Usulan dalam Musrebangcam**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	
			1	1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			100	**100**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	
			7	**7**	**Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	

			7	7	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			100	**100**	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	
			30	**30**	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	
			12	12	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			6	**6**	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	
			8	**8**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	
			12	12	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SELURUH SKPD				12.209.433.906,00		13.395.115.296,60		14.634.626.826,26		15.980.589.508,89		17.458.648.459,77	
Kecamatan Bugul Kidul				9.535.588.909,00		10.539.147.799,90		11.613.062.579,89		12.776.868.837,88		14.054.555.721,67	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah*		3	9.036.229.009,00	3	9.989.851.909,90	3	11.008.837.100,89	3	12.112.220.810,98	3	13.323.442.892,08	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		77		78,6		80,2		81,8		83,4		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi		100%	*26.500.000,00*	100 %	*29.150.000,00*	100 %	*32.065.000,00*	100 %	*35.271.500,00*	100 %	*38.798.650,00*	

	Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6	8.000.000,00	6	8.800.000,00	6	9.680.000,00	6	10.648.000,00	6	11.712.800,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5	3.500.000,00	5	3.850.000,00	5	4.235.000,00	5	4.658.500,00	5	5.124.350,00	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	18.150.000,00	1	19.965.000,00	1	21.961.500,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu		100%	*7.991.648.589,00*	100 %	8.790.813.447,90	100 %	9.669.894.792,69	100 %	10.636.884.271,96	100 %	11.700.572.699,15	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		51	7.846.648.589,00	52	8.631.313.447,90	53	9.494.444.792,69	54	10.443.889.271,96	55	11.488.278.199,15	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		17	5.000.000,00	17	5.500.000,00	17	6.050.000,00	17	6.655.000,00	17	7.320.500,00	

	SKPD												
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		17	*140.000.000,00*	17	154.000.000,00	17	169.400.000,00	17	186.340.000,00	17	204.974.000,00	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat		100%	15.000.000,00	100 %	16.500.000,00	100 %	18.150.000,00	100 %	19.965.000,00	100 %	21.961.500,00	

	Daerah												
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah rencana kebutuhan BMD SKPD		2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	
Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		4	*15.000.000,00*	4	16.500.000,00	4	18.150.000,00	4	19.965.000,00	4	21.961.500,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang meningkat Kompetensinya		100%	2.000.000,00	100 %	2.200.000,00	100 %	2.420.000,00	100 %	2.662.000,00	100 %	2.928.200,00	

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4	2.000.000,00	4	2.200.000,00	4	2.420.000,00	4	2.662.000,00	4	2.928.200,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran		100%	114.500.000,00	100 %	125.950.000,00	100 %	138.545.000,00	100 %	152.399.500,00	100 %	167.639.450,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		4	*8.000.000,00*	4	8.800.000,00	4	9.680.000,00	4	10.648.000,00	4	11.712.800,00	

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan		12	9.000.000,00	12	9.900.000,00	12	10.890.000,00	12	11.979.000,00	12	13.176.900,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundanga-Undangan Yang Disediakan		12	3.000.000,00	12	3.300.000,00	12	3.630.000,00	12	3.993.000,00	12	4.392.300,00	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan		2	10.000.000,00	2	11.000.000,00	2	12.100.000,00	2	13.310.000,00	2	14.641.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	4.500.000,00	12	4.950.000,00	12	5.445.000,00	12	5.989.500,00	12	6.588.450,00	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		12	80.000.000,00	12	88.000.000,00	12	96.800.000,00	12	106.480.000,00	12	117.128.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	66.580.420,00	100 %	123.238.462,00	100 %	155.562.308,20	100 %	173.618.539,02	100 %	190.980.392,92	
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Yang Di Sediakan		0	0	50	50.000.000,00	50	75.000.000,00	50	85.000.000,00	50	93.500.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		15	*66.580.420,00*	15	73.238.462,00	15	80.562.308,20	15	88.618.539,02	15	97.480.392,92	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran		100%	685.500.000,00	100 %	754.050.000,00	100 %	829.455.000,00	100 %	912.400.500,00	100 %	1.003.640.550,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	*500.000,00*	12	550.000,00	12	605.000,00	12	665.500,00	12	732.050,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan		12	85.000.000,00	12	93.500.000,00	12	102.850.000,00	12	113.135.000,00	12	124.448.500,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		12	600.000.000,00	12	660.000.000,00	12	726.000.000,00	12	798.600.000,00	12	878.460.000,00	

	Kantor												
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpeliharaa		100%	134.500.000,00	100 %	147.950.000,00	100 %	162.745.000,00	100 %	179.019.500,00	100 %	196.921.450,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8	*65.000.000,00*	8	71.500.000,00	8	78.650.000,00	8	86.515.000,00	8	95.166.500,00	
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Dipelihara		42	14.500.000,00	42	15.950.000,00	42	17.545.000,00	42	19.299.500,00	42	21.229.450,00	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		4	55.000.000,00	4	60.500.000,00	4	66.550.000,00	4	73.205.000,00	4	80.525.500,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot		100	49.359.900,00	100	54.295.890,00	100	59.725.479,00	100	65.698.026,90	100	72.267.829,59	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata		85	49.359.900,00	86	54.295.890,00	87	59.725.479,00	88	65.698.026,90	89	72.267.829,59	

	n												
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2	49.359.900,00	2	54.295.890,00	2	59.725.479,00	2	65.698.026,90	2	72.267.829,59	

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina		100 %	160.000.000,00	100 %	176.000.000,00	100%	193.600.000,00	100 %	212.960.000,00	100 %	234.256.000,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		15	160.000.000,00	15	176.000.000,00	15	193.600.000,00	15	212.960.000,00	15	234.256.000,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	160.000.000,00	12	176.000.000,00	12	193.600.000,00	12	212.960.000,00	12	234.256.000,00	

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan		100 %	230.000.000,00	100 %	253.000.000,00	100%	278.300.000,00	100 %	306.130.000,00	100 %	336.743.000,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		4	230.000.000,00	4	253.000.000,00	4	278.300.000,00	4	306.130.000,00	4	336.743.000,00	

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan		12	230.000.000,00	12	253.000.000,00	12	278.300.000,00	12	306.130.000,00	12	336.743.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat		100	60.000.000,00	100	66.000.000,00	100	72.600.000,00	100	79.860.000,00	100	87.846.000,00	

Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		4	60.000.000,00	4	66.000.000,00	4	72.600.000,00	4	79.860.000,00	4	87.846.000,00	
Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		4	60.000.000,00	4	66.000.000,00	4	72.600.000,00	4	79.860.000,00	4	87.846.000,00	
KELURAHAN BAKALAN				467.273.864,00		495.739.250,40		525.313.175,44		557.844.492,98		593.628.942,28	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah*		3	69.453.864,00	3	76.399.250,40	3	84.039.175,44	3	92.443.092,98	3	101.687.402,28	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		77		77,1		77,2		77,3		77,4		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran		100 %	69.453.864,00	100 %	76.399.250,40	100%	84.039.175,44	100 %	92.443.092,98	100 %	101.687.402,28	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	69.453.864,00	12	76.399.250,40	12	84.039.175,44	12	92.443.092,98	12	101.687.402,28	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di		100 %	212.500.000,00	100 %	213.750.000,00	100%	215.125.000,00	100 %	216.637.500,00	100 %	218.301.250,00	

	Bina												
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	212.500.000,00	100 %	213.750.000,00	100%	215.125.000,00	100 %	216.637.500,00	100 %	218.301.250,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7	12.500.000,00	7	13.750.000,00	7	15.125.000,00	7	16.637.500,00	7	18.301.250,00	

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan		100 %	18.420.000,00	100 %	22.000.000,00	100%	24.200.000,00	100 %	26.620.000,00	100 %	29.282.000,00	

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		4	18.420.000,00	4	22.000.000,00	4	24.200.000,00	4	26.620.000,00	4	29.282.000,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan		12	20.000.000,00	12	22.000.000,00	12	24.200.000,00	12	26.620.000,00	12	29.282.000,00	

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat		100	166.900.000,00	100	183.590.000,00	100	201.949.000,00	100	222.143.900,00	100	244.358.290,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		4	166.900.000,00	4	183.590.000,00	4	201.949.000,00	4	222.143.900,00	4	244.358.290,00	
Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak		4	166.900.000,00	4	183.590.000,00	4	201.949.000,00	4	222.143.900,00	4	244.358.290,00	

	Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal												
KELURAHAN KRAMPYANGAN				392.053.151,00		444.258.466,10		468.684.312,71		495.552.743,98		525.108.018,38	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah*		3	76.000.000,00	3	83.600.000,00	3	91.960.000,00	3	101.156.000,00	3	111.271.600,00	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		77		77,1		77,2		77,3		77,4		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan		100%	76.000.000,00	100 %	83.600.000,00	100 %	91.960.000,00	100 %	101.156.000,00	100 %	111.271.600,00	

	Perkantoran												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	76.000.000,00	12	83.600.000,00	12	91.960.000,00	12	101.156.000,00		111.271.600,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina		100 %	210.666.600,00	100 %	244.733.260,00	100%	249.206.586,00	100 %	254.127.244,60	100 %	259.539.969,06	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	210.666.600,00	100 %	244.733.260,00	100 %	249.206.586,00	100 %	254.127.244,60	100 %	259.539.969,06	

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7	10.666.600,00	7	11.733.260,00	7	12.906.586,00	7	14.197.244,60	7	15.616.969,06	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun			30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00	

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		7	170.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan		100 %	18.793.900,00	100 %	20.673.290,00	100%	22.740.619,00	100 %	25.014.680,90	100 %	27.516.148,99	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentram		4	18.793.900,00	4	20.673.290,00	4	22.740.619,00	4	25.014.680,90	4	27.516.148,99	

	an dan Ketertiban Umum di Kecamatan												
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan		12	18.793.900,00	12	20.673.290,00	12	22.740.619,00	12	25.014.680,90	12	27.516.148,99	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Masyaraka		100	86.592.651,00	100	95.251.916,10	100	104.777.107,71	100	115.254.818,48	100	126.780.300,33	

	t												
Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		4	86.592.651,00	4	95.251.916,10	4	104.777.107,71	4	115.254.818,48	4	126.780.300,33	
Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh		4	86.592.651,00	4	95.251.916,10	4	104.777.107,71	4	115.254.818,48	4	126.780.300,33	

	Instansi Vertikal											
KELURAHAN BLANDONGAN				462.190.317,00		488.409.348,70		517.250.283,57		548.975.311,93		583.872.843,12	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah*		3	75.891.400,00	3	83.480.540,00	3	91.828.594,00	3	101.011.453,40	3	111.112.598,74	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		77		77,1		77,2		77,3		77,4		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan		100 %	75.891.400,00	100 %	83.480.540,00	100%	91.828.594,00	100 %	101.011.453,40	100 %	111.112.598,74	

	Perkantoran												
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			75.891.400,00		83.480.540,00		91.828.594,00		101.011.453,40		111.112.598,74	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina		100 %	211.625.000,00	100 %	212.787.500,00	100%	214.066.250,00	100 %	215.472.875,00	100 %	217.020.162,50	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	211.625.000,00	100 %	212.787.500,00	100%	214.066.250,00	100 %	215.472.875,00	100 %	217.020.162,50	

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7	11.625.000,00	7	12.787.500,00	7	14.066.250,00	7	15.472.875,00		17.020.162,50	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		12	0	12	0	12	0	12	0		0	

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00		200.000.000,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan		100 %	30.966.200,00	100 %	34.062.820,00	100%	37.469.102,00	100 %	41.216.012,20	100 %	45.337.613,42	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentram		4	30.966.200,00	4	34.062.820,00	4	37.469.102,00	4	41.216.012,20	4	45.337.613,42	

	an dan Ketertiban Umum di Kecamatan												
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan		12	30.966.200,00	12	34.062.820,00	12	37.469.102,00	12	41.216.012,20	12	45.337.613,42	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Masyaraka		100	143.707.717,00	100	158.078.488,70	100	173.886.337,57	100	191.274.971,33	100	210.402.468,46	

	t												
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		4	143.707.717,00	4	158.078.488,70	4	173.886.337,57	4	191.274.971,33	4	210.402.468,46	
Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh		4	143.707.717,00	4	158.078.488,70	4	173.886.337,57	4	191.274.971,33	4	210.402.468,46	

	Instansi Vertikal												
KELURAHAN KEPEL				433.548.919,00		456.903.810,90		482.594.191,99		510.853.611,19		541.938.972,31	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah*		3	73.048.919,00	3	80.353.810,90	3	88.389.191,99	3	97.228.111,19	3	106.950.922,31	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		77		77,1		77,2		77,3		77,4		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran		100 %	73.048.919,00	100 %	80.353.810,90	100%	88.389.191,99	100 %	97.228.111,19	100 %	106.950.922,31	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			73.048.919,00		80.353.810,90		88.389.191,99		97.228.111,19		106.950.922,31	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina		100 %	213.000.000,00	100 %	214.300.000,00	100%	215.730.000,00	100 %	217.303.000,00	100 %	219.033.300,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	213.000.000,00	100 %	214.300.000,00	100%	215.730.000,00	100 %	217.303.000,00	100 %	219.033.300,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga		7	13.000.000,00	7	14.300.000,00	7	15.730.000,00	7	17.303.000,00	7	19.033.300,00	

	Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun			0		0		0		0		0	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas /		7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	

	Ormas)												
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan		100 %	25.000.000,00	100 %	27.500.000,00	100%	30.250.000,00	100 %	33.275.000,00	100 %	36.602.500,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		4	25.000.000,00	4	27.500.000,00	4	30.250.000,00	4	33.275.000,00	4	36.602.500,00	

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan		12	25.000.000,00	12	27.500.000,00	12	30.250.000,00	12	33.275.000,00	12	36.602.500,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat		100	122.500.000,00	100	134.750.000,00	100	148.225.000,00	100	163.047.500,00	100	179.352.250,00	

Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		4	122.500.000,00	4	134.750.000,00	4	148.225.000,00	4	163.047.500,00	4	179.352.250,00	
Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		4	122.500.000,00	4	134.750.000,00	4	148.225.000,00	4	163.047.500,00	4	179.352.250,00	

KELURAHAN BUGUL KIDUL				########		##########		##########		##########		##########	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah*		3	69.334.258,00	3	76.267.683,80	3	83.894.452,18	3	92.283.897,40	3	101.512.287,14	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		77		77,1		77,2		77,3		77,4		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran		100 %	69.334.258,00	100 %	76.267.683,80	100%	83.894.452,18	100 %	92.283.897,40	100 %	101.512.287,14	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum			69.334.258,00		76.267.683,80		83.894.452,18		92.283.897,40		101.512.287,14	

	Kantor												
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina		100 %	210.600.000,00	100 %	211.660.000,00	100%	212.826.000,00	100 %	214.108.600,00	100 %	215.519.460,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	210.600.000,00	100 %	211.660.000,00	100%	212.826.000,00	100 %	214.108.600,00	100 %	215.519.460,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan)		7	10.600.000,00	7	11.660.000,00	7	12.826.000,00	7	14.108.600,00	7	15.519.460,00	

	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun			9.459.600,00		9.459.600,00		9.459.600,00		9.459.600,00		9.459.600,00	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas /		7	190.540.400,00	7	190.540.400,00	7	190.540.400,00	7	190.540.400,00	7	190.540.400,00	

	Ormas)												
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan		100 %	19.500.000,00	100 %	21.450.000,00	100%	23.595.000,00	100 %	25.954.500,00	100 %	28.549.950,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		4	19.500.000,00	4	21.450.000,00	4	23.595.000,00	4	25.954.500,00	4	28.549.950,00	

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan		12	19.500.000,00	12	21.450.000,00	12	23.595.000,00	12	25.954.500,00	12	28.549.950,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat		100	213.000.000,00	100	234.300.000,00	100	257.730.000,00	100	283.503.000,00	100	311.853.300,00	

Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		4	213.000.000,00	4	234.300.000,00	4	257.730.000,00	4	283.503.000,00	4	311.853.300,00	
Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		4	213.000.000,00	4	234.300.000,00	4	257.730.000,00	4	283.503.000,00	4	311.853.300,00	
KELURAHAN				406.344.488,00		426.978.936,80		449.676.830,48		474.644.513,53		502.108.964,88	

TAPAAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah*		3	71.736.800,00	3	78.910.480,00	3	86.801.528,00	3	95.481.680,80	3	105.029.848,88	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		77		77,1		77,2		77,3		77,4		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran		100 %	71.736.800,00	100 %	78.910.480,00	100%	86.801.528,00	100 %	95.481.680,80	100 %	105.029.848,88	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	71.736.800,00	12	78.910.480,00	12	86.801.528,00	12	95.481.680,80	12	105.029.848,88	

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina		100 %	215.000.000,00	100 %	216.500.000,00	100%	218.150.000,00	100 %	219.965.000,00	100 %	221.961.500,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	215.000.000,00	100 %	216.500.000,00	100%	218.150.000,00	100 %	219.965.000,00	100 %	221.961.500,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah (Lembaga Kemasyarakatan) Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7	*15.000.000,00*	7	16.500.000,00	7	18.150.000,00	7	19.965.000,00	7	21.961.500,00	

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun			0		0		0		0		0	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		7	*200.000.000,00*	7	*200.000.000,00*	7	*200.000.000,00*	7	*200.000.000,00*	7	*200.000.000,00*	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan		100 %	22.850.000,00	100 %	25.135.000,00	100%	27.648.500,00	100 %	30.413.350,00	100 %	33.454.685,00	

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan		4	22.850.000,00	4	25.135.000,00	4	27.648.500,00	4	30.413.350,00	4	33.454.685,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan		12	22.850.000,00	12	25.135.000,00	12	27.648.500,00	12	30.413.350,00	12	33.454.685,00	

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat		100	*96.757.688,00*	100	106.433.456,80	100	117.076.802,48	100	128.784.482,73	100	141.662.931,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		4	96.757.688,00	4	106.433.456,80	4	117.076.802,48	4	128.784.482,73	4	141.662.931,00	
Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak		4	96.757.688,00	4	106.433.456,80	4	117.076.802,48	4	128.784.482,73	4	141.662.931,00	

	Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal												

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah/Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	

Salah satu program prioritas adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya persentase penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, subkegiatan yang dilaksanakan meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang mencakup pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah serta tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Persen	4,55	4,57	4,59	4,61	4,62	4,63	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persen	93,50	94,00	94,50	95	95,5	96	

Indikator kinerja utama perangkat daerah yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan pembangunan Kecamatan Bugul Kidul periode 2025–2029. Terdapat dua indikator utama yang ditetapkan. Pertama, Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan satuan persen, yang secara bertahap ditargetkan meningkat dari angka 4,55 pada tahun 2025 hingga mencapai 4,63 pada tahun 2030. Kedua, Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan, yang juga menggunakan satuan persen, ditetapkan dengan target awal 93,50 persen pada tahun 2025 dan meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 96 persen pada tahun 2030. Target-target tersebut mencerminkan komitmen kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIHIL									

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025– 2029 ini disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan lima tahunan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kota Pasuruan. Dokumen ini merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan agar lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penyusunan Renstra ini telah memperhatikan berbagai aspek, termasuk evaluasi kinerja sebelumnya, analisis lingkungan strategis, serta masukan dari para pemangku kepentingan. Melalui Renstra ini, Kecamatan Bugul Kidul berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai dokumen yang bersifat dinamis, pelaksanaan Renstra ini akan senantiasa dimonitor, dievaluasi, dan disesuaikan jika terdapat perubahan kebijakan atau kondisi strategis baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh perangkat kecamatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan sangat diharapkan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Demikian Bab Penutup ini disampaikan sebagai bagian dari dokumen Renstra Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025–2029. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pasuruan, 9 September 2025

CAMAT BUGUL KIDUL



ALYASA AKBAR, S.STP
Pembina
NIP.19851029 200412 1 001

KERTAS KERJA VERIFIKASI
INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Indikator
	KECAMATAN Bugul Kidul					
	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					

	Tujuan: Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Meningkat	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari PEKPPP yang diatur pada PERMENPANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Pengukuran yang diperoleh dari kegiatan PEKPPP melalui instrument atau alat ukur dalam bentuk kuesioner berdasarkan Pedoman MENPANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelengaraan Pelayanan Publik	Laporan PEKPPP Mandiri

	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	Indeks	Sistem pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui E-Sukma Jatim yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	IKM dihitung berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui E-Sukma Jatim, dengan menggunakan skala penilaian tertentu.	Laporan SUKMA E JATIM

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam RKPD	Persen	Menilai tingkat sinergi antara aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan dengan perencanaan pembangunan daerah. Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin responsif perencanaan daerah terhadap aspirasi lokal.	Jumlah usulan musrembangcam yang diakomodir dalam musrembangkot dibagi dengan jumlah usulan musrembangcam	RPJMD Tahun 2021-2026

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Musrebangcam Yang Terlaksana (Kegiatan)	

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait merupakan laporan sub kegiatan yang berada di tingkat kecamatan. Fokus kegiatan ini lebih pada penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dapat di hadiri oleh masyarakat secara umum dan juga instansi terkait. Penyelenggaraan sub kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dilaksanakan pada waktu dan jadwal tertentu di sesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaannya	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang tersusun	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)	Persen	Membandingkan antara Kelembagaan masyarakat yang di bina yang anggarannnya masuk dalam Daftar Perencanaan Anggaran di Kecamatan Bugul Kidul dengan jumlah total Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang Dibina dibandingkan dengan Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang memiliki anggaran pada dokumen perencanaan	RPJMD Tahun 2021-2026

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan	Jumlah Kegiatan atau aksi yang dilaksanakan di Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Yang Terlaksana dibandingkan dengan Total Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah standar belanja untuk sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan . Sub kegiatan ini meliputi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan. Aktivitas yang umum dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah rapat, serta pembinaan.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang tersusun	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	Persen	Membandingkan antara Jumlah Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan yang ditangani dengan jumlah total pengaduan tratibmas dan kebencanaan yang masuk ke Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kejadian Bencana Dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu dibandingkan Total Jumlah Kejadian Bencana Dan Pengaduan Trantibmas	RPJMD Tahun 2021-2026

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	Jumlah Kegiatan atau aksi yang dilaksanakan di Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana dibandingkan dengan Total Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan adalah indikator untuk sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Sub kegiatan ini meliputi aktivitas penanganan konflik sosial yang bertujuan pada penurunan konflik tersebut dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Aktivitas yang umum dilaksanakan pada sub kegiatan ini di antaranya adalah terkait dengan perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta penanggulangan bencana.	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang disusun	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peneyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persen	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh camat sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan kepala daerah, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.	Membandingkan antara Jumlah jenis layanan yang diberikan dengan total layanan pada SK Layanan	RPJMD Tahun 2021-2026

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dilaksanakan oleh perangkat daerah (khususnya camat) berdasarkan mandat atau penugasan dari kepala daerah, dalam rangka mendukung kelancaran fungsi pemerintahan dan pelayanan umum.	Jumlah Kegiatan atau aksi yang dilaksanakan di Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	Dokumen penugasan urusan pemerintahan umum kepada Camat sebagai sebagai bentuk pendelegasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, serta kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang tersusun	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Level Maturitas SPIP	Level	Hasil PK Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat		Bappelitbangda
		Nilai SAKIP SKPD	Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Inspektorat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	%	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)		

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Non Kumulatif	Kepmenda gri 900.1.15.5-3406/2024

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu (%)	%	Persentase laporan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang meliputi laporan administrasi pencatatan dan pelaporan barang, yang telah disusun dan disampaikan oleh perangkat daerah sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau jadwal dari pengelola BMD	Jumlah laporan BMD yang tersusun da n disampaikan tepat waktu dibandingkan dengan Jumlah total laporan BMD yang wajib disampaikan dikali 100%	

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara tertib, sesuai format dan ketentuan, dalam rangka menjamin pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan BMD yang efisien, efektif, dan akuntabel.	Jumlah seluruh dokumen RKBMD yang berhasil disusun dan disahkan oleh SK PD dalam 1 tahun anggaran	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah laporan hasil kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses akuntabilitas dan penatausahaan aset daerah, serta menjadi dasar dalam penyusunan neraca pemerintah daerah dan laporan keuangan.	Total dokumen laporan BMD hasil rekonsiliasi yang disusun dan disampaikan oleh SKPD dalam 1 tahun anggaran	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya (%)	%	Persentase jumlah aparatur sipil negara (ASN) pada perangkat daerah yang mengalami peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan, sertifikasi, bimbingan teknis, magang, atau bentuk peningkatan kapasitas lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga pelatihan terakreditasi, atau mitra kerja resmi dalam satu tahun anggaran.	Jumlah ASN yang mengikuti dan lulus peningkatan kompetensi dibandingkan dengan jumlah total ASN di Perangkat Daerah kali 100%	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Kegiatan rutin dan sistematis yang dilakukan oleh unit kepegawaian perangkat daerah untuk mencatat, memperbarui, dan mengelola data dan dokumen administrasi kepegawaian aparatur sipil negara (ASN), baik dalam bentuk fisik maupun digital, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Jumlah proses administratif kepegawaian yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran (%)	%	Persentase layanan administrasi perkantoran yang telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan unit kerja/perangkat daerah, baik yang bersifat rutin maupun insidentil, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dibandingkan dengan Jumlah total permintaan layanan administrasi perkantoran dikali 100%	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah unit atau paket pekerjaan pengadaan dan/atau pemasangan komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan untuk mendukung fungsi operasional gedung kantor pemerintah daerah.	Total paket komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan dan terpasang sesuai rencana dalam satu tahun anggaran	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (%)	%	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (%)	Non Kumulatif	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran (%)	%	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran (%)	Non Kumulatif	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang di pelihara (%)	%	Persentase barang milik daerah yang di pelihara (%)	Non Kumulatif	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)	%	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu (%)	Non Kumulatif	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Non Kumulatif	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	KELURAHAN BAKALAN					
	UNSUR KEWILAYAHAN					
	KECAMATAN					

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Prosentase kelembagaan masyarakat yang dibina (persen)*	%	Membandingkan antara Kelembagaan masyarakat yang di bina yang anggarannnya masuk dalam Daftar Perencanaan Anggaran di Kecamatan Bugul Kidul dengan jumlah total Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang Dibina dibandingkan dengan Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang memiliki anggaran pada dokumen perencanaan	RPJMD Tahun 2021-2026

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana*	%	kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, baik melalui pendanaan APBD, Dana Kelurahan, atau sumber lainnya. Kegiatan pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan.	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelura han yang terlaksana dibandindkan dengan Jumlah total kegiatan pemberdayaan kelurahan yang direncakan	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Lembaga Kemasyarakatan	Mengukur tingkat keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di kelurahan	Total lembaga kemasyarakatan yang h adir dan berpartisipasi dalam forum M usrenbang di kelurahan	Kepmenda gri 900.1.15.5-3406/2024

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Unit	Unit sarana dan prasarana fisik yang berhasil dibangun atau ditingkatkan di wilayah kelurahan dalam satu tahun anggaran, sesuai dengan rencana kerja dan kebutuhan masyarakat. Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan infrastruktur dasar yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi, lingkungan, dan pelayanan masyarakat di kelurahan.	Total unit sarana dan prasarana kelurahan yang telah selesai dibangun dan di serahterimakan dalam 1 tahun anggaran	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Pokmas / Ormas	Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang secara aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan dalam satu tahun anggaran	Total Pokmas dan Ormas yang melaksanakan minimal satu kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dalam satu tahun anggaran	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan	Persen	Membandingkan antara Jumlah Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan yang ditangani dengan jumlah total pengaduan tratibmas dan kebencanaan yang masuk ke Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kejadian Bencana Dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu dibandingkan Total Jumlah Kejadian Bencana Dan Pengaduan Trantibmas	RPJMD Tahun 2021-2026

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	Jumlah Kegiatan atau aksi yang dilaksanakan di Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana dibandingkan dengan Total Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Laporan	Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan adalah indikator untuk sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Sub kegiatan ini meliputi aktivitas penanganan konflik sosial yang bertujuan pada penurunan konflik tersebut dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Aktivitas yang umum dilaksanakan pada sub kegiatan ini di antaranya adalah terkait dengan perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta penanggulangan bencana.	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang disusun	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peneyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persen	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh camat sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan kepala daerah, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan.	Membandingkan antara Jumlah jenis layanan yang diberikan dengan total layanan pada SK Layanan	RPJMD Tahun 2021-2026

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dilaksanakan oleh perangkat daerah (khususnya camat) berdasarkan mandat atau penugasan dari kepala daerah, dalam rangka mendukung kelancaran fungsi pemerintahan dan pelayanan umum.	Jumlah Kegiatan atau aksi yang dilaksanakan di Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	*Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal*	Dokumen	Dokumen penugasan urusan pemerintahan umum kepada Camat sebagai sebagai bentuk pendelegasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, serta kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang tersusun	Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Level Maturitas SPIP	level	Hasil PK Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Bappelitbangda
		Nilai SAKIP SKPD	Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Non Kumulatif (Nilai Akhir)	Bappelitbangda
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran (%)*	%	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran (%)*	Non Kumulatif	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Laporan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*		Kepmendagri 900.1.15.5-3406/2024